

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Pihak prinsipal bertindak sebagai yang membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang. Lupia & McCubbins (2007) menyatakan bahwa ;

Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau kelompok orang memilih orang atau kelompok lain untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak bagi orang lain atau ketika seorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

Mustapha dan Ahmad (2011) menyatakan bahwa asumsi yang timbul pada teori keagenan ini adalah agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal karena agen lah yang bertindak sebagai eksekutor dan kesenjangan informasi tersebut mempengaruhi secara negatif kemampuan prinsipal untuk mengawasi secara penuh apakah kepentingan prinsipal dilayani dengan baik atau tidak oleh agen. Asumsi lain yang timbul adalah prinsipal dan agen bertindak secara rasional sehingga mereka akan memanfaatkan hubungan keagenan tersebut untuk memaksimalkan kekayaan yang mereka miliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa agen memiliki kepentingan sehingga kemungkinan dapat mengambil kesempatan untuk bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan prinsipal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah serta perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah. Dengan adanya pemberian wewenang dalam bidang penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini, masyarakat sebagai prinsipal berharap pemerintah daerah selaku agen dapat menggunakan seluruh kewenangan yang telah diberikan baik dalam untuk menyejahterakan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui adanya

peningkatan dan pemerataan pendapatan.

2.1.2 Indeks Gini

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 mendefinisikan indeks gini atau yang lebih dikenal dengan gini rasio adalah salah satu alat analisis untuk menghitung tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan antar wilayah yang dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1 jika nilai indeks semakin mendekati 0 mengindikasikan ketimpangan yang semakin merata sedangkan nilai indeks gini yang semakin mendekati 1 artinya ketimpangan antar penduduk semakin tinggi. Menurut Sastra (2017:42), “Indeks gini adalah indikator kesenjangan pendapatan yang biasa digunakan untuk melihat sejauh mana distribusi pendapatan di kalangan rumah tangga mengalami penyimpangan dari distribusi yang merata secara sempurna.” Adanya kesenjangan pendapatan mengindikasikan tidak meratanya konsentrasi ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Dampaknya, masyarakat akan cenderung berpindah ke daerah-daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi untuk memperbaiki taraf hidup. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Indeks Gini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

Keterangan :

Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Badan Pusat Statistik (2020:3) mendefinisikan “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu.” Terdapat dua jenis PDRB yang digunakan yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(PDRB ADHK). Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun sementara produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. “Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. Adapun untuk produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode.”

Untuk menghitung produk domestik regional bruto, Badan Pusat Statistik (2020:4) membagi tiga macam pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran :

1. Pendekatan Produksi

Perhitungan produk domestik regional bruto dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang berhasil diciptakan oleh masing-masing kegiatan ekonomi yang ada pada suatu wilayah lalu dijumlahkan. Dalam pendekatan ini, seluruh kegiatan ekonomi dikelompokkan ke dalam 17 kategori lapangan usaha yaitu : (a) Pertanian, kehutanan dan perikanan, (b) Pertambangan dan penggalian, (c) Industri pengolahan, (d) Pengadaan listrik, (e) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (f) Konstruksi, (g) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (h) Transportasi dan pergudangan, (i) Penyediaan akomodasi dan makan minum, (j) Informasi dan komunikasi, (k) Jasa keuangan dan asuransi (l) *Real estate*, (m) Jasa perusahaan, (n) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (o) Jasa pendidikan, (p) Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya, serta (q) Jasa lainnya

2. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan produk domestik regional bruto dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menghitung semua balas jasa yang diterima oleh masing-masing faktor produksi yaitu upah, gaji, dan surplus usaha serta ditambah dengan unsur penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan atau nilainya sama dengan nol.

3. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan produk domestik regional bruto dengan pendekatan pengeluaran dilakukan berdasarkan komponen pengeluaran akhir yang menggunakan atau mengonsumsi nilai tambah tersebut. Komponen pengeluaran akhir tersebut terdiri dari : (a) Pengeluaran konsumsi akhir

rumah tangga, (b) Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (c) Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (d) Pembentukan modal tetap bruto, (e) (f) Perubahan inventori, dan (g) Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mankiw (2017:12), pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah (*government purchases*) “mencakup seluruh pengeluaran atas berbagai barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah (semua instansi, semua tingkatan mulai dari pemerintah pusat/federal, pemerintah negara bagian atau pemerintahan provinsi, hingga pemerintahan lokal atau kotapraja)”. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Mangkoesobroto (2016:169) menyatakan bahwa “teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro”

1. Teori makro

a. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow. Mereka memberikan pandangan bahwa ada hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan proses tahapan pembangunan suatu daerah meliputi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal ini besaran investasi dari pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi pembangunan karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana untuk menunjang dalam hal pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Pada tahap selanjutnya atau tahap menengah, investasi dari pengeluaran pemerintah tetap berlangsung untuk menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dari tahapan tinggal landas tetapi pada tahap ini peran swasta sudah sangat besar. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana menuju pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif atautkah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif seperti teori Musgrave, maka hukum Wagner sebagai berikut: Dalam suatu

perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat .

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat pemahaman masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Dampaknya, penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Hal ini disebut dengan efek pengalihan, yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Masyarakat sadar akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah. Pemerintah harus bertindak untuk menangani hal-hal tersebut agar keadaan dapat kembali normal.

2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan barang lain. Permintaan terhadap barang publik ini akan membuat pemerintah mengatur sejumlah kegiatan-kegiatan dan/atau menggunakan berbagai fungsi produksi. Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor berikut yaitu : (a) perubahan permintaan akan barang publik, (b) perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, (c) perubahan kualitas barang publik, serta (d) perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

2.1.5 Investasi

Investasi yang lazim disebut juga penanaman modal atau pembentukan modal dalam Sukirno (2013:121) diartikan sebagai “pengeluaran yang dilakukan investor atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa tersedia dalam perekonomian”. Noor (2014:2) mendefinisikan “Investasi

adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya (*resources*) saat ini (sekarang) dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang)". Menurut Sukirno (2013:122), "faktor-faktor yang menentukan tingkat investasi adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, suku bunga, ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan".

Noor (2014:4) menyatakan bahwa "alasan dilakukan investasi pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu investasi untuk memenuhi kebutuhan (*Needs*) masyarakat terhadap barang dan jasa dan investasi untuk memenuhi keinginan (*Wants*) masyarakat terhadap barang dan jasa". Investasi untuk memenuhi kebutuhan (*Needs*) masyarakat terhadap barang dan jasa dilakukan untuk memastikan keberlangsungan kehidupan yang dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan minimal syarat kehidupan. Investasi untuk memenuhi keinginan terhadap barang dan jasa (*Wants*) dilakukan atas dorongan untuk memenuhi tuntutan baru selain pemenuhan kebutuhan minimal syarat kehidupan seperti rekreasi. Investasi menurut Mankiw dalam Anggina dkk (2017) adalah "komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan". Ada 3 jenis pengeluaran investasi yang terdiri dari: (a) Investasi tetap bisnis (*business fixed invesment*) mencakup peralatan dan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. (b) Investasi residensial (*residential invesment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewa. (c) Investasi persediaan (*inventory invesment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Investasi merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang berkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan hanya daerah-daerah yang dinilai mendapat keuntungan yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam teori investasi Harrod-Domar dalam Sukirno (2013:437), “pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila pengeluaran agregat, salah satunya adalah investasi terus menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan.” Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses *multiplier*) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap kapasitas produksi. Untuk meningkatkan laju perekonomian, maka dibutuhkan investasi sebagai stok tambahan modal. Investasi tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah, dan investasi terhadap perkembangan indeks gini akan diuraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aditya Iswanto (2018)	Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa (Tahun 2011-2016)	X1 = Inflasi X2 = Produk Domestik Regional Bruto X3 = Jumlah Penduduk Miskin X4 = Pengeluaran Pemerintah Y = Indeks Gini	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. • Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. • Pengeluaran Pemerintah berpengaruh

				<p>positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. • Inflasi, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah, dan Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan
2.	Dewi Septiani Dwi Kusuma, Dra. Sudati Nur Sarfiah, Yustirania Septiani (2019)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017	$X1 = \text{Produk Domestik Regional Bruto}$ $X2 = \text{Inflasi}$ $X3 = \text{Indeks Pembangunan Manusia}$ $Y = \text{Ketimpangan Pendapatan}$	<ul style="list-style-type: none"> • Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. • Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan

				<p>terhadap Ketimpangan Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. • Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.
3.	Del Anggina, Wahyu Dwi Artaningtyas (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014	X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = Pertumbuhan Penduduk X3 = Pertumbuhan Investasi X4 = Indeks Pembangunan Manusia Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Indeks Gini)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. • Pertumbuhan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. • Pertumbuhan

				<p>Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.
4.	Ramadhan Febrianto (2017)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur 2011-2015	<p>X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = Belanja Daerah X3 = IPM Y = Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dalam meningkatkan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah. • Belanja Daerah memiliki pengaruh dalam meningkatkan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah. • IPM memiliki pengaruh dalam menurunkan ketimpangan Pendapatan Antar Daerah.
5.	Desi Putri Utami BR Ginting (2020)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan	<p>X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = Investasi X3 = IPM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan

		Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Y = Ketimpangan Pendapatan	<p>tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.
6.	Faiza Dwi Angzila (2020)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Ratio Gini Jawa Timur Tahun	<p>X1 = Indeks Pembangunan Manusia X2 = Inflasi X3 = Jumlah Penduduk Miskin X4 = Tingkat Pengangguran Terbuka Y = Ketimpangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Ratio Gini. Inflasi

		2013-2017	Pendapatan (Indeks Ratio Gini)	<p>memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Ratio Gini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Ratio Gini. • Tingkat Pengangguran Terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Ratio Gini • Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran terbuka secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan (Indeks Ratio Gini).
7.	Muhammad Arif, Rossy Agustin Wicaksani (2017)	Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang	X1 = Indeks Pembangunan Manusia X2 = Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh

		Mempengaruhinya	X3 = Tenaga Kerja X4 = Jumlah penduduk Y = Indeks Gini	positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi tingkat Ketimpangan Pendapatan. • Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. • Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan.
8.	Lorentino Togar Laut, Arinda Sita Putri, Yustirania Septiani (2020)	Pengaruh PMA, PMDN, TPAK, PDRB Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan Jawa	X1 = Penanaman Modal Asing X2 = Penanaman Modal Dalam Negeri X3 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja X4 = PDRB Per Kapita X5 = Pengeluaran Pemerintah Y = Disparitas Pendapatan (Indeks Gini)	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan. • Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh

				<p>signifikan terhadap Disparitas Pendapatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk Domestik Regional Bruto Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan. • Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan. • Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Disparitas Pendapatan.
9.	Naelul Autor (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan	X1 = Produk Domestik Regional Bruto X2 = Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> • Produk Domestik Regional Bruto

		Pendapatan di Jawa Tengah (2010-2017)	X3 = Jumlah Penduduk Y = <i>Gini Ratio</i>	<p>berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. • Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan
--	--	---------------------------------------	---	---

10.	Alfiatus Sholihah (2019)	Pengaruh PDRB Perkapita dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Bali	X_1 = PDRB Per kapita X_2 = Investasi Y = Ketimpangan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan • Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan • PDRB per kapita dan investasi berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan.
-----	--------------------------	--	--	---

11.	Masri Fithrian, S.T., Prof. Dr. Nur Syechalad, M.Si., Dr. Muhammad Nasir, M. Sc. (2015)	Analisis Pengaruh Agregat Demand dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh	X1 = Konsumsi X2 = Investasi X3 = pengeluaran Pemerintah X4 = Tingkat Pendidikan Y = Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan • Investasi swasta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan. • Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan • Tingkat Pendidikan berpengaruh Positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan Pendapatan.
-----	---	---	---	--

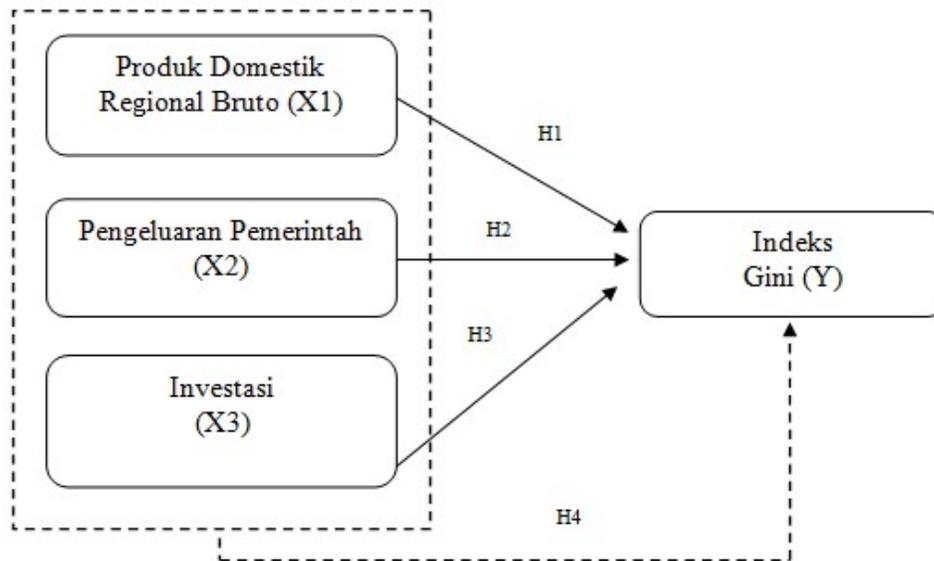
Sumber : data yang diolah, 2021

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang telampir di atas, pada penelitian ini indeks gini sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yakni Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:60), “Kerangka Penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan landasan teori

dan masalah penelitian, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi Terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2018:99) mendefinisikan “Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.” Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Perkembangan Indeks Gini

Menurut BPS (2020:3) “Produk domestik regional bruto merupakan bahan penentuan kebijakan dan evaluasi pencapaian pembangunan. Produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu.” Iswanto (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dapat disimpulkan apabila produk domestik regional bruto suatu daerah

meningkat, maka ketimpangan pendapatan akan berkurang dan indeks gini daerah tersebut akan turun mendekati angka 0. Produk domestik regional bruto merupakan cerminan kemampuan daerah dalam mengelola potensi sektor-sektor ekonomi yang terdapat di daerahnya sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat diukur dengan pendapatan per kapita yang diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa produk domestik regional bruto secara parsial berpengaruh terhadap perkembangan indeks gini.

H1 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Perkembangan Indeks Gini

2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perkembangan Indeks Gini

Menurut Mangkoesobroto (2016:169);

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Todaro (2011:303) menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik.” Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap menurunnya ketimpangan pendapatan di masyarakat dan indeks gini. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap perkembangan indeks gini.

H2 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Perkembangan Indeks Gini

2.4.3 Pengaruh Investasi Terhadap Perkembangan Indeks Gini

Harrod-Domar dalam Ginting (2020) menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat

per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Melalui uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi memiliki andil penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Tambahan modal yang diberikan oleh investor dapat berdampak terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Ketimpangan pendapatan akan berkurang dan indeks gini daerah tersebut akan turun mendekati angka 0. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa investasi secara parsial berpengaruh terhadap perkembangan indeks gini.

H3 : Investasi berpengaruh terhadap Perkembangan Indeks Gini